BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan prinsip transparansi berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango. Artinya memang prinsip transparansi ini berpengaruh namun pengaruhnya itu tidak secara terus-menerus. Hasil ini sesuai dengan hipotesis pertama dalam penelitian ini. Sehingga bisa diketahui jika penerapan prinsip transparansi yang merupakan salah satu prinsip dari *good governance* ini diterapkan dengan baik maka kinerja pemerintah juga akan baik khususnya kinerja dalam bidang keuangan yakni menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Karena laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan kinerja pemerintah juga baik adanya. Sehingga informasi yang didalamnya bisa digunakan oleh semua pihak dalam pengambilan keputusan.
2. Hasil penelitian menemukan Penerapan prinsip akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis kedua dalam penelitian ini. Artinya jika prinsip akuntabilitas diterapkan secara baik maka kinerja pemerintah juga akan baik terkhusus kinerja dalam bidang keuangan, yakni menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

3. Hasil penelitian menemukan Penerapan prinsip *value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango. Hasil ini sesuai dengan hipotesis ketiga dalam penelitian ini. Artinya jika dalam suatu pemerintahan penerapan prinsip *value for money* ini yang mengacu pada tiga elemen dasar yang menjadi pedomannya yakni ekonomis, efektif dan efisien diterapkan dengan baik, maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah terutama kinerja dalam bidang keuangan yakni menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
4. Hasil penelitian menemukan bahwa secara simultan penerapan prinsip-prinsip *good governance* : transparansi, akuntabilitas dan value for money berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari azlim (2012) bahwa variabel *good governance* berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD banda aceh. Dapat ditarik kesimpulan jika pelaksanaan *good governance* dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik, salah satu kinerja bidang keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Melalui pengujian setiap indikator transparansi bahwasannya indikator dengan nilai terendah sebesar 76,2% terletak pada indikator dengan instrumen pernyataan suara atau usulan rakyat selalu terakomodasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango. Dengan skor terendah memberikan gambaran bahwa indikator tersebut belum terjabarkan dengan baik. Sehingganya diharapkan agar indikator suara atau usulan rakyat lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah kabupaten Bone bolango agar menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kinerja, Terutama kinerja dalam bidang keuangan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan.
2. Melalui pengujian setiap indikator, indikator dengan nilai skor terendah sebesar 72,8% yakni indikator akuntabilitas proses/prosedur dengan instrumen pernyataan pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya. Dengan skor terendah memberikan gambaran bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dengan indikator pernyataan tersebut penerapannya masih jauh dari harapan. Sehingga indikator dengan pernyataan tersebut sebaiknya lebih diperhatikan lagi dengan cara memberikan kesadaran terhadap pegawai atas tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, memberikan pelatihan kepada pegawai yang memiliki kemampuan yang kurang memadai dan memperbaiki sistem yang digunakan dalam melaksanakan tugas. Karena untuk memiliki laporan

keuangan yang berkualitas, pemerintah daerah kabupaten bone bolango juga harus bekerja keras untuk memperolehnya.

3. Untuk dapat memiliki laporan keuangan yang semakin berkualitas, pemerintah daerah kabupaten bone bolango khusunya bagi dinas pendapatan pengelolaan keuangan daerah penerapan prins*ip Value for money* in*i* yang merupakan prinsip yang mengacu pada tiga elemen dasar yang menjadi acuan yakni ekonomis, efektif dan efisien, diharapkan perlu diperhatikan lagi terutama indikator efisien dengan item pernyataan menghindari pengangguran sumber daya, karena indikator dengan item pernyataan tersebut memperoleh skor yang paling rendah sebesar 79,1%.
4. Bagi peneliti selanjutnya, agar lebih mengembangkan lagi variabel-variabel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian demi untuk menemukan variabel lain yang lebih berpengaruh kuat terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu adanya tingkat kesibukan yang dimiliki oleh responden, sehingga dalam pengisian kuisioner terkadang responden terburu-buru dalam mengisinya tanpa membaca dengan teliti setiap pernyataan yang diajukan dalam kuisioner. Selain itu adanya kendala bersifat inheren dengan metode kuisioner terutama berkaitan dengan perasaan senang dan tidak senang, keseriusan dan faktor situasional lain ketika responden memberikan jawaban. Sehingga kedepan untuk peneliti yang ingin melaksanakan penelitian dengan topik yang sama agar lebih memperhatikan proses dalam memperoleh data dilapangan agar didapatkan data yang benar-benar terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Azlim, dkk . 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi Volume 1, No 1, Agustus 2012*.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang, Pamungkas. 2012. Pengaruh Penerapan Akuntansi Publik Dan Kualitas Peraturan Perundangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Ilmiah Ranggading Volume 12, No 1 , April 2012.*

Daniel, dkk. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tual. *Jurnal Stie Semarang Volume 5, No 3, Oktober 2013.*

Desi, handayani. 2012*.* Good governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis vol.5, Desember 2012,12-16.*

Dwi susanto, dkk. 2014. Pengaruh good governance terhadap kualitas pemberian pelayanan publik. *Jurnal paradigma vol.12, No.2, agustus 2014.*

Ghozali, Imam. 2009. "*Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*". Edisi: 4. BP Universitas Diponegoro: Semarang.

Hajrin, Abdul. 2015. Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pengendalian Anggaran Terhadap Good Governance Pada Pemerintah Kota Gorontalo. *Skripsi.*

Halim, Abdul. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu manajemen YKPN

Halim, Abdul.2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan daerah*, edisi Revisi. Jakarta : Salemba empat

Ira Amelia, dkk. 2014. Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Volume12, No 2, Desember 2014.*

Iman, Windiarto randi.2010. Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Komitmen

Organisasi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan Kota Surakarta. *Skripsi*

Lucy Auditya, dkk. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness Volume 3, No 1, 2013 Bengkulu.*

Meyi, Kantu. 2015. Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Gorontalo. *Skripsi*.

Mardiasmo. 2002 . *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.

_____ . 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.

_____ . 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.

Nurillah, As. Syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Skripsi.*

Octaviyani, Fitri. 2009. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance TerhadapKualitas Laporan Keuangan Pada PT Pertamina (PERSERO). *Jurnal Manajemen Bisnis Eksekutif Vol. 1 No. 1.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

_____ Nomor 33 Tahun 2004 Tenang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah

_____ Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

_____ Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

_____ Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ridwan, 2004. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta

Santoso, Singgih. 2012. *Analisis SPSS pada Statistik Parametrik*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo

Saleba, Siti. Nurjannah 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Setda Kota Baubau). *Skripsi*.

Sugiyono. 2012. *Statistika untuk Penelitian.* Bandung : Alfabeta

Ulum, Ihyaul. 2012. *Audit Sektor Publik. Jakarta* : PT Bumi Aksara

_____ . 2008. *Akuntansi Sektor Publik* . Malang : UMM Press.

www.gorontalo.bpk.go.id. di akses pada Tgl 20 September 2015

Www.gorontalopost.com/baca.berita.bonbol-terima-piagam-wtp-dari-kemenkeu-ri. di akses pada Tgl 20 September 2015 .

Yusuf, Dedy. 2009. Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung*. Skripsi*

Zeyn. 2011. Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kabupaten Sukamara. *Jurnal Trinomika Volume 10, No 1, Juni 2011.*